

Judul : Partai Pemerintah Pada Pasang Badan
Tanggal : Sabtu, 25 Maret 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Larangan Bukber Dituding Cegah Konsolidasi Partai Pemerintah Pada Pasang Badan

PARTAI pendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin *rame-rame* membela larangan buka bersama bagi pejabat negara, yang dituding sebagai bentuk kekhawatiran terhadap konsolidasi umat Islam jelang Pilpres 2024. Tudingan ini dinilai berlebihan.

"Jangan terlalu jauh curiga-nya. Ini hanya upaya dan bentuk rasa kehati-hatian Presiden, Pemerintah, terhadap situasi yang saat ini masih dalam masa transisi pandemi," kata politisasi PDI Perjuangan, Rahmat Handoyo kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Anggota Komisi IX DPR itu menegaskan, meskipun saat ini tidak diberlakukan pembatasan, masyarakat wajib menjaga kewaspadaan terhadap Covid-19. "Jadi janganlah berprasangka buruk, terlebih baru memasuki bulan Ramadan. Yang disam-
paikan Presiden ini positif, bentuk kewaspadaan," tegasnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Sekjen PAN) Eddy Soeparno mengatakan, tidak ada diskriminasi terhadap umat Islam ihwal kebijakan Presiden Jokowi melarang pejabat dan pegawai Pemerintah melakukan acara buka puasa bersama. "Bukan kegiatan buka puasa bersama secara umum," ujar Eddy kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini menilai, dengan dasar pemahaman bahwa Presiden Jokowi melarang seluruh pejabat pemerintah baik pusat hingga daerah, dan bukan melarang kegiatan yang dilakukan masyarakat, maka tidak elok muncul narasi bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi itu anti Islam.

"Jangan menyebar *hoax* dengan isu yang tidak bertanggungjawab. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadhan dengan lisan dan tindakan yang mulia" ajaknya.

Diyakininya, tidak ada diskriminasi atas aturan ini. PAN menggaransi, jika masyarakat ingin berbuka bersama di Masjid atau di tempat lain, itu tidak ada larangannya. "Saya pun mengagendakan acara-

acara bukber di dapil dengan masyarakat, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan," katanya.

Berbeda, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf mengaku, larangan menggelar buka puasa bersama bukan hal yang perlu diperdebatkan serius. Apalagi, bagi warga NU yang menurutnya tidak terbiasa dengan buka puasa bersama. Namun, yang lebih tepat, kata Gus Yahya, buka puasa bersama dilakukan bersama dengan kaum fakir miskin atau dengan kelompok yang membutuhkan.

Sebelumnya, beredarnya arahan larangan berbuka puasa yang tertuang melalui surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 yang diteken Sekretaris Kabinet (Sekab) Pramono Anung, 21 Maret 2023.

Intinya, regulasi ini melarang pejabat negara melakukan kegiatan berbuka puasa bersama berbasis tiga poin. Pertama, pertengahan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 2023 atau Ramadhan 1444 Hijriah agar ditiadakan. Ketiga, Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati dan wali kota.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah mencabut larangan buka bersama itu, karena tidak sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi. Selain itu, saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19. "Jangan-jangan larangan buka bersama dikawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres 2024," tuding politisi PKS, Nasir Djamil.

Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsyi kasihan kepada Jokowi karena diduga ada pembisik yang salah memberi masukan. Alhasil, lewat aturan ini, Jokowi bisa dipersepsikan arogan terhadap umat Islam. ■ **FAQ/BSH**